

BAB III

HASIL PENELITIAN (PENYAJIAN DATA)

Pada bab ini penulis akan menyajikan hasil dari penelitian yang telah penulis laksanakan mengenai manajemen strategi penanganan anak jalanan di Kota Semarang. Dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan hasil penelitian yang terbentuk secara kualitatif yang didapatkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi serta melalui studi *literature* dari berbagai sumber. Informan yang penulis pilih sebagai narasumber adalah individu-individu yang dianggap berkompeten dalam memberikan informasi.

Setelah menentukan informan atau narasumber, selanjutnya dalam mendalami permasalahan yang ada melalui wawancara, penulis menggunakan daftar pedoman wawancara (*interview guide*) yang di dalamnya berisi pertanyaan-pertanyaan penting sesuai dengan fenomena penelitian yang sedang penulis dalami, yaitu Manajemen Strategi Penanganan Anak Jalanan di Kota Semarang. Pedoman wawancara berisi indikator yang lahir dari lingkungan eksternal dan internal organisasi sesuai dengan fokus perencanaan strategis. Jawaban dari hasil wawancara yang penulis peroleh dari para informan untuk menjadi hasil penelitian.

3.1 Deksripsi Informan

Subjek penelitian atau informan yang diambil pada penelitian ini adalah narasumber yang dinilai paham dan terlibat langsung dalam pengimplementasian manajemen strategis penanganan anak jalanan. Informasi yang diterima dari informan

berupa data primer melalui hasil wawancara tentang permasalahan yang ingin diteliti. Data primer hasil wawancara yang telah dikumpulkan kemudian disajikan ke dalam bentuk paparan dan penjelasan. Pihak-pihak yang menjadi informan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No.	Informan	Nama Informan	Pekerjaan
1.	Informan 1	Anggie Ardhitia, SH	Staf dari Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Perdagangan Orang bidang Rehabilitasi Sosial.
2.	Informan 2	Dwi Supratiwi, SH	Ketua Koordinator Penanganan PGOT (Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar) dan Anak Jalanan dari TPD (Tim Penjangkauan Dinas Sosial).
3.	Informan 3	Tsaniatus Solihah	Manager Program Yayasan Setara sebagai perwakilan dari LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Kota Semarang.
4.	Informan 4	Gideon Surya Nugroho	Ketua RPSA (Rumah Perlindungan Sosial Anak) dari Yayasan Emas Indonesia Kota Semarang.
5.	Informan 5	Angkie Materai	Anak binaan dari RPSA Yayasan Emas Indonesia.

Berdasarkan lampiran pada tabel 3.1, maka dapat dilihat bahwa informan yang dari pihak Dinas Sosial yang diwakili oleh staf dari Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Perdagangan Orang bidang Rehabilitasi Sosial. Seksi tersebut secara teknis yang langsung bergerak dalam pelaksanaan Manajemen Strategi Penanganan Anak Jalanan dalam pelaksanaan mandat oleh Walikota Semarang. Ketua Koordinator Penanganan PGOT (Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar) dan Anak Jalanan

dari TPD (Tim Penjangkauan Dinas Sosial) adalah merupakan teknisi lapangan yang bekerja dalam rangka penjangkauan dan patroli diantaranya pada anak-anak jalanan yang ditemukan di beberapa titik di wilayah Kota Semarang.

Manager Program Yayasan Setara sebagai perwakilan dari LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Kota Semarang, sebagai wakil masyarakat yang bergerak di bidang sosial sebagai *partner* dari Dinas Sosial yang memfokuskan kegiatannya pada permasalahan anak dan juga memberikan dukungan berupa moril seperti sumbang pikiran kepada Dinas Sosial dalam pelaksanaan Manajemen Strategi Penanganan Anak Jalanan di Kota Semarang, lalu kemudian Ketua RPSA (Rumah Perlindungan Sosial Anak) dari Yayasan Emas Indonesia Kota Semarang yang membina langsung para anak jalanan di rumah singgah sebagai proses pembinaan mental dan *mindset* pada anak binaannya, dan dari anak binaan dari RPSA Yayasan Emas Indonesia yang merupakan mantan anak jalanan yang memulai proses untuk meninggalkan status diri sebagai anak jalanan dan merubah pola hidup dengan kehidupan yang lebih baik ke depannya.

3.2 Manajemen Strategi Penanganan Anak Jalanan di Kota Semarang

Manajemen strategi menurut Barney (dalam Rachmat, 2014: 15), adalah proses pemilihan dan penerapan strategi, sedangkan strategi adalah pola alokasi sumber daya yang memungkinkan organisasi dapat mempertahankan kinerjanya. Grant (dalam Rachmat, 2014: 15), memahami strategi sebagai keseluruhan rencana mengenai penggunaan sumber daya untuk menciptakan posisi menguntungkan. Dengan kata lain, manajemen strategik terlibat dengan pengembangan dan implementasi strategi dalam

kerangka pengembangan keunggulan bersaing. Hitt, dkk (dalam Rachmat, 2014: 15) menyebutkan bahwa manajemen strategik adalah proses untuk membantu perusahaan dalam mengidentifikasi hal-hal yang ingin dicapai dan cara mencapai hal yang bernilai. Ketiga ahli di atas, yaitu Barney, Grant, Michael A. Hitt, R. Duane Ireland, dan Robert E. Hoslisson memiliki kesamaan dalam berpendapat bahwa manajemen strategik adalah proses pengalokasian sumber daya untuk membantu organisasi dalam pencapaian tujuan.

David (2009: 5) menjelaskan bahwa manajemen strategi adalah seni dan pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsional yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuannya. Menurut David, manajemen strategis berfokus pada usaha yang merujuk pada perumusan, implementasi, dan evaluasi strategis yang berguna sebagai pengintegrasian manajemen, pemasaran, keuangan, operasi, penelitian dan pengembangan, serta sistem informasi komputer untuk mencapai keberhasilan organisasional.

Siagian (2005: 27), menjelaskan bahwa manajemen strategis merupakan suatu proses yang dinamik karena ia berlangsung secara terus-menerus dalam suatu organisasi, kemudian Siagian, menjelaskan bahwa manajemen strategis merupakan serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian organisasi tersebut (2008: 34). Pengertian manajemen strategik oleh Fred. R. David dan Siagian mempunyai kesamaan yaitu bahwa manajemen strategis merupakan

keputusan dan tindakan fungsional dalam rangka mendukung suatu pencapaian organisasi tersebut.

Wheelen dan Hunger (dalam Rachmat (2014: 23) menjelaskan bahwa manajemen strategik merupakan sekumpulan dan keputusan dan aksi manajerial yang menentukan kinerja organisasi dalam jangka panjang. Jika pada gambaran mengenai manajemen strategik di atas oleh David dan Siagian yang menyatakan bahwa manajemen strategis merupakan keputusan dan tindakan fungsional dalam rangka mendukung suatu pencapaian organisasi tersebut, sedikit berbeda halnya dengan yang dikemukakan oleh Wheelen dan Hunger yang lebih menekankan pada keputusan manajerial dalam perencanaan jangka panjang untuk menentukan kinerja organisasi. Wheelen dan Hunger juga menambahkan bahwa semua yang berkaitan dengan fungsi-fungsi manajemen merupakan tugas penting manajer seperti yang dikemukakan oleh David dan Siagian.

Manajemen strategis penting kedudukannya di dalam organisasi karena, pertama, manajemen strategik dapat membedakan seberapa jauh organisasi mencapai tujuannya. Kedua, berkaitan dengan perusahaan harus menghadapi segala bentuk perubahan situasi, sekalipun kecil dan tidak signifikan, setiap perubahan harus tetap ditanggapi oleh manajer dalam memutuskan hal-hal yang harus dilakukan dan cara melakukannya agar manajer siap dalam berhadapan dengan lingkungan yang serba tidak pasti. Ketiga, manajemen strategik selalu terlibat dalam setiap keputusan yang dibuat oleh manajer.

Direktorat Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia, Departemen Sosial (2001: 30) memaparkan bahwa anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya, usia mereka berkisar dari 6 tahun sampai 18 tahun. Definisi menurut Direktorat Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia, Departemen Sosial (2001: 30) (dalam Ramadhani, dkk, 2016: 947) memaparkan bahwa anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya, usia mereka berkisar dari 6 tahun sampai 18 tahun. Anak berkeliaran atau melakukan kegiatan di jalanan dengan waktu yang dihabiskan di jalanan lebih dari 4 jam dalam sehari. Penampilannya kebanyakan tidak terurus dengan pakaian yang lusuh. Para anak jalanan tersebut menghabiskan waktunya di jalan demi mencari nafkah, baik dengan kerelaan hati maupun karena fenomena eksploitasi anak, yaitu melalui paksaan orang tuanya. Seorang anak yang seharusnya mendapatkan bimbingan, perlindungan dan kasih sayang dari orang tua serta mendapatkan pendidikan yang layak. Namun, pada kenyataannya, masih banyak ditemukan perlakuan menyimpang terhadap anak-anak ini, yaitu eksploitasi anak dengan menelantarkan anak dan memperkerjakan anak di jalanan.

Menurut Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa anak terlantar adalah yang tidak dipenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Pada alinea ke-4 *prembule* atau pembukaan UUD 1945 tertuang tujuan negara yang akan dicapai, salah satu tujuan

negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, yang secara rinci telah diatur dalam pasal 34 UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang tertera dalam pasalnya:

“Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, mengembangkan jaminan sosial dan bertanggung jawab menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum”.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menimbang bahwa ada 3 poin yang harus diperhatikan:

1. Anak adalah potensi dan penerus cita-cita bangsa yang dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya.
2. Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.
3. Anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial dan ekonomi, maka usaha pemeliharaan kesejahteraan umum anak diusahakan oleh negara yang diatur dalam UUD.

Menurut data yang dikutip dari Dinas Sosial Kota Semarang, anak-anak jalanan ini terbagi atas berbagai macam kegiatan, seperti pengamen, pengemis, penjual koran, penyemir sepatu, pemulung dan tukang parkir. Manajemen Strategi Penanganan Anak Jalanan di Kota Semarang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan dibantu tim bentukan dari Dinas Sosial itu sendiri, yaitu TPD (Tim Penjangkauan Dinas Sosial) untuk anak jalanan, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang berbentuk Yayasan dan oleh RPSA (Rumah Perlindungan Sosial Anak) yang ada di Kota Semarang.

Fenomena anak jalanan di Kota Semarang disebabkan oleh beberapa faktor. Untuk melihat secara detail terkait dengan faktor-faktor tersebut, maka akan dijelaskan menggunakan beberapa fenomena penelitian untuk mengetahui bagaimana Manajemen Strategi Penanganan Anak Jalanan di Kota Semarang tersebut. Adapun beberapa fenomena-fenomena manajemen strategi yang akan digunakan penulis, yaitu:

3.3 Analisis Lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal merupakan bagaimana cara menganalisis organisasi secara internal dilihat dari bagaimana kondisi di dalam organisasi dalam rangka menilai atau mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi. Pada penelitian ini, penulis untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam Manajemen Strategi Penanganan Anak Jalanan di Kota Semarang. Faktor-faktor yang tercakup dalam lingkungan internal adalah kesesuaian visi dan misi organisasi, kualitas sumber daya manusia, anggaran atau dana, serta ketersediaan sarana dan prasarana. Penulis jabarkan sebagai berikut:

3.3.1 Kesesuaian Visi dan Misi Dinas Sosial

Tangkilisan (2005: 257), menyebutkan bahwa visi merupakan suatu pikiran yang melampaui realitas sekarang, sesuatu atau keadaan yang diciptakan, yang belum pernah ada sebelumnya dan akan diwujudkan oleh seluruh anggota organisasi. Visi memberikan gambaran kondisi yang akan dicapai oleh organisasi di masa yang akan

datang. Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan atau ditetapkan.

Visi Dinas Sosial adalah Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang Berdaya Saing. Misi Dinas Sosial adalah: Mengembangkan Potensi serta Peran Aktif Masyarakat, Keluarga, Organisasi/lembaga Sosial, Dunia Usaha guna mendukung Potensi Sumber Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan meningkatkan pengelolaan Sumber dana Kesejahteraan Sosial serta melestarikan Nilai-Nilai kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial untuk menjamin keberlanjutan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial; Meningkatkan Profesionalisme Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial; Meningkatkan Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; Meningkatkan Pelayanan Penanganan Fakir Miskin Kota Semarang.

Mengenai adanya kesesuaian antara visi dan misi Dinas Sosial ini dijelaskan oleh informan 1, Pak Anggie, adalah sebagai berikut:

“Ya, untuk mewujudkan kesesuaian visi dan misi bagi kesejahteraan sosial masyarakat yang berdaya saing bagi anak jalanan ya kita harus melakukan pendampingan dulu, jadi setelah kita melakukan pendampingan dengan orangtua, ya kita melakukan pendampingan juga ke anaknya dengan cara kita pantau terus. Jadi, selalu kita pantau, untuk yang ex-turun-turun ke jalan itu. Selain penanganan anak jalanan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan, kita juga melakukan langkah pemberdayaan masyarakat agar masyarakat terutama dari penyandang masalah kesejahteraan sosial, seperti anak jalanan, untuk ke depannya lebih mandiri dan berdaya saing, melalui selain cara-cara assesment yang telah disebutkan kemudian dilakukan pendampingan melalui pantauan langsung oleh Dinas Sosial. Kemudian, untuk anak-anak jalanan yang masih berada diusia sekolah ya ke depan mungkin kita akan memberikan mereka berbagai pelatihan-pelatihan untuk mendapatkan berbagai pelatihan-

pelatihan (soft skills) itu yang sesuai dengan minat dan bakat anak-anak jalanan tersebut. Bentuk pelatihannya seperti pelatihan otomotif (las, bengkel mobil dan bengkel motor) menjahit, dan salon kecantikan Pelatihan-pelatihan ini selain diadakan oleh Dinas Sosial juga dilakukan oleh Yayasan-yayasan Masyarakat yang bekerja sama langsung dengan Dinas Sosial. Artinya, Dinas Sosial juga melakukan pemantauan langsung kepada yayasan-yayasan ini. Jadi, dengan begitu visi dan misi dapat tercapai.” (Wawancara 28 November 2017)

Sebagai upaya dalam mewujudkan kesesuaian visi dan misi Dinas Sosial berupaya melaksanakan berbagai usaha lanjutan *assessment* melalui pengenalan berbagai *soft skills* kepada anak jalanan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berdaya saing untuk ke depan anak jalanan diharapkan memiliki bekal untuk masa depan mereka sehingga mereka teralihkan kegiatannya, dan diharapkan tidak perlu lagi turun-turun ke jalan. Pernyataan dari informan 1 tersebut di atas juga diperkuat dengan pernyataan oleh informan 2, Mba Tiwi, yang mengatakan bahwa:

“Kesesuaian visi dan misi kan harus didukung dengan pelaksanaan kegiatan dulu harus sesuai. Kalau di anak jalanan ya anak-anak yang telah melalui tahapan penjangkaran, assesment, kemudian dilanjutkan pendalaman permasalahan, lalu rujukan ke RPSA maupun panti sesuai persetujuan anak terus untuk menumbuhkan daya saing anak itu adalah melalui pelatihan yang nanti pas udah di rujuk ke panti atau RPSA, kegiatannya ada menjahit, salon, dan otomotif. Biar visi dan misi itu sejalan.” (Wawancara 21 Desember 2017)

Berdasarkan wawancara dengan narasumber di atas, bahwa dalam rangka mencapai kesamaan visi dan misi maka setelah ditemukan pokok-pokok permasalahan melalui pendalaman masalah, maka selanjutnya adalah bagaimana pencapaian visinya diarahkan ke pencapaian misi melalui pengarahan penjangkaran anak-anak melalui berbagai bentuk pelatihan yang ada di RPSA. Seperti yang dijelaskan pada kalimat

diawal bahwa visi memberikan gambaran kondisi yang akan dicapai oleh organisasi di masa yang akan datang, sedangkan misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan atau ditetapkan (Tangkilisan: 2005: 257). Maka, dalam hal ini Dinas Sosial harus mengedepankan tercapainya misi-misi sehingga visi pada kemudian hari juga akan tercapai.

3.3.2 Kualitas Sumber Daya Manusia

Pengertian sumber daya manusia menurut Salusu (dalam Tangkilisan, 2005: 10) adalah suatu cara untuk mengendalikan sumber daya manusia dalam suatu organisasi atau institusi secara efektif dan efisien, serta mencakup keseluruhan aktivitas dan implementasi untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dimaksud. Sumber Daya Manusia di dalam Dinas Sosial yang mengendalikan keseluruhan aktivitas dan implementasi dalam rangka Manajemen Strategi Penanganan Anak Jalanan dilaksanakan oleh bidang seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Perdagangan Orang bidang Rehabilitasi Sosial. Mengenai masalah sumber daya manusia, hal ini dijelaskan oleh informan 1, Pak Anggie, sebagai berikut:

“Ya, dalam masalah sumber daya ini masalahnya kuantitas ya mba, jadi kekurangan tenaga manusianya. Jadi, kami nggak bisa jalan sendiri karena masalah sumber daya manusia yang terbatas ini. Untuk itu, kami kami memiliki tim. Tim itu bukan PNS tapi kami bentuk berdasarkan SK (Surat Keputusan) Kepala Dinas, tim yang itu bentuk dalam rangka penanganan anak-anak jalanan orang-orang yang bermasalah, yaitu TPD (Tim Penjangkauan Dinas Sosial) yang saya sebutkan tadi untuk menutupi keterbatasan SDM kita, jadi strategi kita ya dengan membentuk TPD itu.” (Wawancara 28 November 2017)

Pelaksanaan Manajemen Strategi Penanganan Anak Jalanan tidak bisa jika hanya dilaksanakan oleh seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Perdagangan Orang saja karena keterbatasan jumlah atau kuantitas SDM. Untuk itu Dinas Sosial membentuk sebuah tim sebagai strategi menutupi kekurangan dalam hal SDM, yaitu dengan membentuk TPD (Tim Penjangkauan Dinas Sosial) sebagai tangan kanan dari Dinas Sosial kota Semarang. TPD ini yang melakukan kegiatan teknis di lapangan dalam rangka penjangkauan dan mengatasi masalah anak jalanan di Kota Semarang. Informan 2, Mba Tiwi, mengatakan:

“Jadi, TPD itu adalah sebuah tim yang dibentuk oleh Dinas Sosial Kota Semarang dalam rangka sebagai kepanjangan Dinas Sosial kaitannya dengan permasalahan PGOT (Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar) dan dalam rangka pelayanan perlindungan dan jaminan sosial bagi anak jalanan. Kegiatan kami dengan bidang Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Perdagangan Orang melalui assesment, kemudian dilanjutkan pendalaman permasalahan itu seperti apa, baru setelah tahu kasusnya oh seperti ini (kasusnya) lalu kemudian dirujuk (rujukan) dan untuk ditanyakan kepada anak jalanan apa dia mempunyai keluarga apa tidak. Kalau tidak punya keluarga akan dirujuk ke Panti Rehabilitasi Sosial Anak, tapi kalau memang ada keluarganya, kita kembalikan ke keluarganya dengan catatan masih dalam tahap pendampingan TPD sampai dengan tahapan yang lebih baik, contoh yang usia sekolah harus sampai ia mau sekolah kalau nggak mau sekolah kita rumahkan dia (home schooling) biar bisa tetep belajar di rumah. Nah, untuk belajar di rumah itu kita kerjasama sama RPSA dan Yayasan-yayasan yang ada. Kami bekerjasama sesuai dengan tugas jadi pekerjaan akan lebih cepat dilaksanakan apabila kompak.” (Wawancara 21 Desember 2017)

Berdasarkan informasi dari dua informan di atas, dapat ditarik simpulan bahwa informan keduanya sepakat bahwa dalam rangka menutupi kekurangan SDM, seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Perdagangan Orang dibantu oleh TPD dengan cara

saling berkoordinasi. Koordinasi di dalam tim sangat dibutuhkan dan harus selalu dijaga demi terciptanya tujuan seperti yang telah direncanakan. Kemudian juga harus ada kerjasama dengan dinas lain, lembaga sosial serta semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial bagi orang-orang penyandang masalah sosial. Kedua pernyataan oleh informan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial bagi orang-orang penyandang masalah sosial ini tidak hanya dilakukan antar berbagai bidang di dalam Dinas Sosial saja, melainkan juga dengan berbagai elemen lintas Dinas maupun organisasi kemasyarakatan. Kaitan antara kinerja organisasi dengan sumber daya manusia dalam proses penyelenggaraan organisasi publik bermuara pada kemampuan daerah untuk mempersiapkan jajaran birokrasi yang ada bagi penyelenggaraan pelayanan publik secara optimal dan berdaya guna (Tangkilisan, 2005: 10).

Berdasarkan proses penyelenggaraan pelayanan publik secara optimal seperti yang telah Hessel sebutkan, maka kualitas sumber daya manusia akan mempengaruhi kinerja dalam Dinas Sosial. Berikut penulis sajikan data mengenai kepegawaian di Dinas Sosial mengenai jumlah personil ASN yang ada di Dinas Sosial Kota Semarang per tanggal 4 Oktober 2017 dilihat dari tingkat pendidikan pegawai di Dinas Sosial Kota Semarang sebagai berikut:

Tabel 3.2
Jumlah Pegawai Dinas Sosial berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase
	ASN		
1.	SD	0	0
2.	SLTP	1	0,23
3.	SLTA/SMK/Sederajat	15	3,57
4.	D3	4	0,95
5.	Strata 1 (S1)	28	6,66
6.	Strata 2 (S2)	6	1,42
	Staf Non ASN		
1.	SLTA/SMK/Sederajat	1	0,23
2.	Stata 1 (S1)	4	0,95
	PSKS		
3.	SLTA/SMK/Sederajat	267	63,57
4.	D 3	15	3,57
5.	Stata 1 (S1)	75	17,85
6.	Strata 2 (S2)	4	0,95
	Jumlah	420	100

Sumber: Rencana Strategis Dinas Sosial, diolah, 2017

Berdasarkan pada tabel 3.2 di atas, maka dapat diketahui bahwa jumlah pegawai yang ada di Dinas Sosial adalah sebanyak 54 orang, Staf Non ASN sebanyak 5 orang dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebanyak 361 orang. Lalu, pegawai dari Dinas Sosial Kota Semarang diketahui memiliki tingkat pendidikan yang beragam. Pada tabel di atas, jumlah pegawai dengan tingkat pendidikan paling banyak berada pada tingkat pendidikan SLTA/SMK/Sederajat dengan presentase mencapai angka hingga 63,57% pada pegawai PSKS, sedangkan tingkat pendidikan terendah, yaitu SD diketahui nihil.

3.3.3 Anggaran atau Dana

Anggaran adalah bagian fundamental dari banyak program pengawasan organisasi. Anggaran mencerminkan sasaran, rencana, dan program-program organisasi yang dinyatakan dalam bentuk bilangan (Handoko, 2011: 277). Tangkilisan (2005: 66) menyebutkan bahwa faktor keuangan penting dalam setiap kegiatan pemerintahan, karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang tidak membutuhkan biaya. Berkaitan dengan proses Manajemen Strategi Penanganan Anak Jalanan di Kota Semarang, anggaran dana ditunjukkan sebagai faktor penunjang tercapainya keberhasilan program. Penulis menanyakan bagaimana peranan Pemerintah Kota Semarang dalam hal finansial dan apakah anggaran tersebut sudah dinilai cukup efektif dalam rangka upaya Manajemen Strategi Penanganan Anak Jalanan di Kota Semarang. Hal ini dipaparkan langsung oleh informan 1 sebagai berikut:

“Alokasi anggarannya dalam berdasarkan mapping anak jalanan, awalnya harus dipatrol di dulu untuk mengetahui mana wilayah terbanyak untuk jumlah anak jalannya, nanti dari situ kita kan baru tahu, anak itu nanti dimasukkan ke mana, nih? Harus dimasukkan ke panti atau dikembalikan ke keluarganya. Nah, dalam penanganan itu kan tentunya butuh biaya, dari situ nanti kita bisa menghitung, secara kotor ya, sesuai kebutuhan masing-masing untuk kemudian dialokasikan. Ya cukup lah untuk kegiatan penanganan anak jalanan.”
(Wawancara 28 November 2017)

Peranan Pemerintah Kota Semarang dalam hal finansial adalah melalui penganggaran pada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan penjarangan dari TPD setelah *assessment* yang kemudian mengalihkan anak-anak tersebut untuk dititipkan ke panti-panti maupun RPSA yang ada di kota Semarang untuk diberikan

anggaran secara kotor melalui perhitungan. Kemudian informan 2, Mba Tiwi, juga menimpali hal serupa, dengan mengatakan bahwa:

“Dilihat dari anggaran ya cukup sekali. Bantuan dari pemerintah untuk penanganan anak jalanan juga ada, ya antara lain dengan langsung dikasih modal pada anak jalanan (untuk yang sudah selesai sekolah), diberikan lifeskills atau dia disalurkan kepada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan, sampai dengan tahap itu, supaya dia tidak menganggur dan kembali ke jalanan lagi. Modal, iya, krn kita juga ada kerjasama lintas dinas, seperti Dinas Ketenagakerjaan itu bisa, kemudian ada Dinas Koperasi, ya tergantung bakat dan minatnya dia (anak jalanan tersebut) itu di mana, DISPERINDAG (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) juga bisa. Jadi, Dinas Sosial itu menjaga hubungan baik lintas dinas untuk kaitannya dengan anak jalanan. Ya, anggarannya sangat cukup sekali. Harapannya ketika anak sudah tidak sekolah lagi dia mampu menjalani kehidupannya sendiri dan sudah mandiri, harapannya itu bisa kreatif, inovatif, dan mandiri.” (Wawancara 21 Desember 2017)

Kemudian selain bentuk anggaran tersebut, sebagaimana dikemukakan oleh informan 2, Mba Tiwi, bahwa bantuan finansial yang diberikan adalah dalam bentuk pemberian modal berupa uang, namun tidak hanya dalam masalah material saja, namun juga non material, yaitu berkaitan dengan pemberian *lifeskills* untuk anak-anak jalanan agar tidak menganggur dan mempunyai kegiatan yang bermanfaat supaya ke depan perhatiannya teralih dan tidak lagi turun ke jalanan. Hal ini dibenarkan oleh informan 5, Dek Angkie, sebagai berikut

“Bantuan pemerintah ada setahun sekali, itu bentuknya modal. Dikasih ke kita ya biar kita ada kegiatan, latihan wirausaha. Jadi, biar nggak bosan. Jadi, kegiatannya di sini ya kalau pagi bersih-bersih, habis sarapan bersih-bersih (bekas makan), bantuin mas Tono jaga coffe. Oh iya, dulu pernah dikasih ayam enam ekor.” (Wawancara 17 Januari 2018)

Informan 5, sebagai anak binaan dari RPSA Yayasan Emas Indonesia memberikan informasi bahwa bantuan yang diberikan pemerintah adalah dalam bentuk pemberian modal untuk melatih jiwa wirausahanya. Kemudian oleh informan 4, Mas Surya, memberi penjabarannya sebagai berikut:

“Bantuan dari pemerintah ada, namanya PKSA (Program Kesejahteraan Sosial Anak), bentuknya untuk gizi anak, itu dari Kementerian Sosial, ada juga program jadi pemerintah kasih semacam modal untuk dikembangkan, jadi kita dikasih kambing 6 ekor. Kalau dari Dinas Sosial kota program setengah tahun sekali, itu pendampingan. Awal tahun belum tahu. Pelatihan softskills, terus pembekalan itu untuk anak-anak dan orangtua juga. Misal, orangtua yang nggak mampu terus kan itu biasanya mereka mendorong anak-anak untuk turun ke jalan, karena anak-anak gampang dapet uangnya karena banyak yang kasihan jadi ada program pendampingan itu dari pemerintah. Terus ada modal untuk tetap bisa bertahan hidup, berupa uang untuk kehidupan sehari-hari. Perhatian lain dari pemerintah itu aja sih.” (Wawancara 17 Januari 2018)

Berdasarkan informasi dari informan 2, 4, dan 5 mereka menyebutkan bahwa ada bantuan berupa modal dan Program Kesejahteraan Sosial Anak berupa perbaikan gizi. Berbeda dengan keempat informan di atas, informan 3, Mba Ika, memberikan pernyataan yang bersebrangan dengan mengatakan:

“Anggaran yang diberikan apakah itu hal yang serius untuk dilakukan dalam mengatasi anak jalanan? Jumlah anak jalanan berapa? Apakah anggaran tersebut benar-benar sudah dianggap serius dalam penanganan anak jalanan? Padahal sudah ada Perda yang menanggalkan dana tersebut, bahwa pemerintah harus mengalokasikan dana untuk kegiatan penanganan anak jalanan. Itu memang untuk mendukung ketiadaan anak jalanan. Cuma, memang tidak ada program terobosan yang membantu untuk masalah itu, kalau kita, LSM dan masyarakat itu kan hanya partisipasi dan mendukung dalam penanganan anak jalanan. Tapi kewajibannya kan kembali lagi ke OPD (Organisasi Perangkat Daerah), dalam hal ini Dinas Sosial dan Pemerintah

Kota Semarang. Kampanye itu hanya sebagian saja tetapi intervensinya itu apa? Kita sudah sering diskusi menanyakan bisa ga dianggarkan entah itu CSR atau apa? Hak pendididkan, bagaimana sinergi antar OPD ini? Sinergi antar dinas bagaimana? Contoh, Dinas Pendidikan harus ada beasiswa, sejauh mana itu telah berjalan? Ada beasiswa, tapi kalau programnya tidak tersalurkan dengan benar? Tidak ada assesment langsung ke anak jalanan langsung ya buat apa. Dinas Kesehatan juga sama, tentang informasi kesehatan ini sampai nggak sosialisasi ke masyarakat? Kendala mereka belum teratasi dengan maksimal.” (Wawancara 8 Januari 2018)

Menurut informan 3, Mba Ika, bahwa banyak masalah mengenai penganggaran ini kurang efektif sebagaimana yang disebutkan oleh pihak Dinas Sosial terkait masalah anggaran. Kegiatan Manajemen Strategi Penanganan Anak Jalanan di Kota Semarang memang dibantu oleh berbagai elemen yang ikut serta bersinergi dalam penanganan anak jalanan ini. Dengan penganggaran yang lebih serius untuk memaksimalkan kegiatan penanganan anak jalanan ini, karena masalah penganggaran ini telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang dalam pasal 27 ayat 4, yang berbunyi:

“Pemerintah Daerah mengalokasikan dana yang cukup dan memadai dalam APBD untuk penyediaan Sarana Prasarana dan Program Kegiatan dalam rangka penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis”.

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh para informan di atas, penulis mengambil simpulan bahwa anggaran yang ada belum sepenuhnya tercapai dengan efektif. Tidak semua anak jalanan di Kota Semarang itu terjangkau secara menyeluruh dan cukup dengan anggaran yang ada karena masih banyak jumlah anak jalanan di

Kota Semarang. Anggaran itu kemudian juga digunakan untuk operasional OPD, kemudian apalagi jika dimanfaatkan oleh berbagai LSM yang menangani anak jalanan, dapat dipastikan bantuan pemerintah yang diberikan lebih sedikit, padahal kegiatan operasional yang dilakukan juga sama besarnya dengan lembaga yang lainnya.

Berikut ini anggaran yang digunakan oleh Dinas Sosial dalam rangka Manajemen Strategi Penanganan Anak Jalanan yang penulis dapatkan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2017:

Tabel 3.3
Anggaran dalam Rangka
Manajemen Strategi Penanganan Anak Jalanan di Kota Semarang

Program dan Kegiatan	No.	Uraian	Anggaran yang digunakan (Rp)
Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS: Terlaksanakannya kegiatan penjangkaran PGOT (Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar), Anak Jalanan, dan WTS (Wanita Tuna Susila) di Kota Semarang.	1.	Belanja Pegawai	12.724.000
	2.	Belanja Alat Tulis Kantor (keperluan penjangkaran PGOT, anjal, dan WTS)	1.572.600
	3.	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	2.530.000
	4.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	14.280.000
	5.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.956.400
	6.	Belanja Makanan Dan Minuman (mulai rapat koordinasi hingga kegiatan penjangkaran)	103.022.000
	JUMLAH		

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2017, diolah, 2017

Tabel 3.3 menunjukkan, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Manajemen Strategi Penanganan Anak Jalanan, Pemerintah Kota Semarang menggunakan APBD (Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah). Masukan (*input*) dari kegiatan ini adalah Dana sebesar Rp139.085.000, SDM 12 orang, waktu pelaksanaan 12 bulan; keluaran (*output*) berupa pelaksanaan penjaringan PGOT, anak jalanan, dan WTS di Kota Semarang; dan hasil akhir (*outcome*) dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan penjaringan PGOT, anak jalanan. dan WTS di Kota Semarang.

3.3.4 Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Proses kegiatan Manajemen Strategi Penanganan Anak Jalanan di Kota Semarang juga membutuhkan ketersediaan sarana dan prasarana sebagai aspek yang sangat penting dalam rangka memudahkan pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian tujuan, yaitu penanganan anak jalanan. Mengenai kondisi sarana dan prasarana ini, informan 1, Pak Anggie, menyebutkan:

“Kondisi sarana dan prasarana yang kami miliki cukup baik ya mba, dan masih untuk layak digunakan.” (Wawancara 28 November 2017)

Menurut pendapat informan 1, menyebutkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana cukup dalam pelaksanaan kegiatan Manajemen Strategi Penanganan Anak Jalanan di Kota Semarang, seperti ketersediaan mobil untuk kegiatan penjaringan, ATK, *handphone*, dll. Selain itu, mengenai kondisi sarana dan prasarana ini, informan 2, Mba Tiwi, menyebutkan:

“Sarana dan prasarana ya kami gunakan untuk penjangkaran itu ya apa yang ada kami maksimalkan dengan baik sehingga kegiatan bisa tetap berjalan, ya ada ambulance sama mobil buat kegiatan penjangkaran. Ya, pokoknya apa yang ada dimaksimalkan lha.” (Wawancara 21 Desember 2017)

Berdasarkan keterangan dari kedua informan di atas, bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Semarang dalam rangka Manajemen Strategi Penanganan Anak Jalanan di Kota Semarang dinilai sudah cukup memadai, tim juga berusaha dengan memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada. Berikut ini penulis paparkan mengenai data ketersediaan sarana dan prasarana dari Dinas Sosial Kota Semarang dalam rangka Manajemen Strategi Penanganan Anak Jalanan di Kota Semarang:

Tabel 3.4
Ketersediaan Sarana dan Prasarana Dinas Sosial dalam Rangka Manajemen Strategi Penanganan Anak Jalanan di Kota Semarang

No.	Jenis	Jumlah (buah)
1.	Sepeda Motor	5
2.	Mobil	2
3.	Handphone	5
4.	Kamera	2
5.	Alat Tulis Kantor (stopmap, amplop, USB, buku, kertas, clip, bollpoint, lem, snelhectar)	50
6.	Laptop	1
7.	Printer	1
8.	Papan Informasi	1

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2017, diolah, 2017

Berdasarkan tabel 3.4 di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam rangka Manajemen Strategi Penanganan Anak Jalanan di Kota Semarang, yaitu dengan memanfaatkan dan memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada. Hal ini menurut informan 1 dan 2 dirasa cukup mampu dilaksanakan dalam kegiatan pencapaian tujuan sehingga program dapat dengan mudah tercapai karena didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

3.3.5 Keterlibatan dan Komitmen *Stakeholder*

Stakeholder adalah pihak-pihak yang terlibat dan memberikan dukungan langsung kepada pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian tujuan. *Stakeholder* dapat berasal dari pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Informan 1, Pak Anggie, menjelaskan:

“Adanya dukungan dari pihak lain ya kami rasa sangat penting karena Dinas Sosial tidak bisa bekerja sendiri karena tidak mudah untuk menyelesaikan permasalahan sosial, khususnya anak jalanan ini. Jadi, harus juga melibatkan pihak-pihak lain, ya seperti harus ada koordinasi antara masyarakat dan Dinas maupun Tim yang terkait. Selain itu juga kami kan ada kerjasama dengan lembaga atau organisasi pemerintah lain seperti Dinas Pendidikan, DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), kemudian ada juga dari lembaga keamanan negara seperti Kodim (Komando Distrik Militer), Polrestabes (Kepolisian Resos Kota Besar) dan Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja). Lalu, yayasan dari pemerintah ada RPSA dan dari swasta seperti LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan yayasan yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri, serta media massa, ” (Wawancara 28 November 2017)

Berdasarkan pendapat informan tersebut di atas, keterlibatan dan komitmen serta sinergi antar berbagai pihak sangat dibutuhkan dalam rangka pencapaian tujuan

program. Keterlibatan para *stakeholder* ini juga memberikan bantuan berdasarkan masing-masing tugas pokok dan fungsinya. Pernyataan dari informan 1 tersebut di atas juga diperkuat dengan pernyataan oleh informan 2, Mba Tiwi, yang mengatakan bahwa:

“Untuk dukungan dari pihak lain atau stakeholder ya penting, perlu sekali ada komitmen dan kerjasama antara semua pihak. Kita bekerjasama antar lintas dinas juga, sama panti, yayasan, RPSA. Jadi, kita nggak bisa sendiri dibantu banyak pihak, seperti ada juga dari Polrestabes, Satpol PP, Kodim (Komando Distrik Militer), Yayasan Masyarakat dan Dinas Pendidikan.” (Wawancara 21 Desember 2017)

Berdasarkan pada hasil wawancara di atas, keterlibatan *stakeholders* sangat penting dalam proses Manajemen Strategi Penanganan Anak Jalanan di Kota Semarang. Keterlibatan tersebut dapat berupa bantuan moril dari Dinas dan masyarakat. Pihak-pihak pemerintah yang terlibat dalam Manajemen Strategi Penanganan Anak Jalanan ini seperti Dinas Pendidikan, DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), kemudian ada juga dari lembaga keamanan negara seperti Kodim (Komando Distrik Militer), Polrestabes (Kepolisian Resos Kota Besar) dan Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja). Yayasan dari pemerintah ada RPSA dan dari swasta seperti LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan yayasan yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri, serta media massa.

3.4 Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan internal merupakan bagaimana cara menganalisis organisasi secara eksternal (dilihat dari bagaimana kondisi di luar organisasi) dalam

rangka menilai atau mengidentifikasi peluang dan ancaman organisasi. Pada penelitian ini digunakan penulis untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman dalam Manajemen Strategi Penanganan Anak Jalanan di Kota Semarang. Faktor-faktor yang tercakup dalam lingkungan eksternal adalah faktor ekonomi, politik, sosial dan budaya, partisipasi masyarakat, teknologi, dan dukungan pemerintah dalam rangka Manajemen Strategi Penanganan Anak Jalanan di Kota Semarang. Penulis jabarkan sebagai berikut:

3.4.1 Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi masyarakat di Kota Semarang menjadi faktor yang penting di dalam Manajemen Strategi Penanganan Anak Jalanan. Tangkilisan (2005: 89) menjelaskan bahwa indikator yang banyak digunakan sebagai tolok ukur potensi ekonomi daerah adalah PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Tangkilisan (2005: 91) juga menyebutkan bahwa tingginya *income* per kapita suatu daerah mencerminkan bahwa daerah tersebut mempunyai kegiatan ekonomi yang mobilitasnya tinggi dan masyarakatnya hidup pada tingkat yang lebih sejahtera. Informan 1, Pak Anggie menyebutkan:

“Njih, tentu faktor ekonomi sangat berpengaruh. Rata-rata anak yang turun ke jalanan itu ya karena faktor ekonomi. Minimnya penghasilan dari orangtua itu jadi faktor pendorong anak berhenti sekolah dan akhirnya turun ke jalanan. Jadi, semakin mempengaruhi jumlah atau bertambahnya anak jalanan.”
(Wawancara 28 November 2017)

Berdasarkan pendapat dari informan 1 di atas, pengaruh faktor ekonomi keluarga, dalam hal ini adalah masalah minimnya penghasilan orangtua menjadi faktor

ketidakmampuan orangtua untuk memberikan fasilitas pendidikan kepada anak-anaknya. Hal itu kemudian membuat anak-anak menjadi korban anak-anak putus sekolah dan mendorong anak-anak untuk hidup di jalanan. Sebagai dampak dari minimnya pendapatan keluarga. Informan 2, Mba Tiwi, menjelaskan:

“Iya, faktor ekonomi penting dan berpengaruh, karena keluarganya miskin tho akhirnya anak-anak yang jadi korban. Bahkan ada itu dari keluarganya sendiri yang menyuruh anak-anaknya ikut jualan Koran. Biasanya nanti ibunya ngawasin dari jauh. Kita kan kemarin sempet nanya ya “kenapa bu, ko anaknya yang diminta untuk dagang?” dijawab “karena kalo saya yang dagang nggak bakal laku mba, karena nggak ada yang kasihan sama aku, tapi kalo anak-anak itu mesti ada yang kasihan.” (Wawancara 21 Desember 2017)

Rendahnya penghasilan di dalam keluarga menyebabkan lahirnya faktor kemiskinan yang menjadikan anak-anak lahir sebagai korban kemiskinan. Berdasarkan pendapat dari informan 2 di atas, bahwa orangtua yang miskin memaksa anak-anaknya untuk ikut andil dalam kegiatan mencari nafkah karena dianggap anak lebih dapat menimbulkan rasa iba dari orang-orang. Hal ini seperti juga dijelaskan oleh informan 3, Mba Ika, yang menyebutkan:

“Kondisi perekonomian ini ikut andil dan sangat berperan serta dalam lahirnya anak jalanan. Faktor ekonomi akar permasalahannya ya persoalan ekonomi keluarga, dalam hal ini pendapatan orangtua itu sendiri dalam memenuhi kebutuhan keluarga itu kecil, yang mana hal ini memaksa anak untuk ikut terlibat dalam kegiatan mencari nafkah. ekonomi. ” (Wawancara 8 Januari 2018)

Selain dari ketiga informan di atas yang sepakat bahwa faktor ekonomi sangat berperan penting dalam menyebabkan lahirnya anak jalanan, seorang informan yang merupakan anak binaan RPSA Yayasan Emas Indonesia menyebutkan:

“Aku kan asalnya dari Ambon, dulu umur 8 tahun diajak ke Jogja katanya mau disekolahkan, sampai setahun nyatanya nggak disekolahkan karena nggak ada biaya. Akhirnya kabur dari rumah, dari Jogja lari dari rumah terus hidup di jalan dari umur 9 tahun sampai 15 tahun, lalu ketemu sama yayasan ini.”
(Wawancara 17 Januari 2018)

Seperti yang dikatakan Tangkilisan (2005: 91) bahwa ukuran PRDB per kapita masih bisa dijadikan sebagai tolok kemakmuran ekonomi suatu daerah. Tingginya *income* per kapita suatu daerah mencerminkan bahwa daerah tersebut mempunyai kegiatan ekonomi. Mobilitas masyarakatnya tinggi dan masyarakatnya hidup pada tingkat yang lebih sejahtera. Maka, dapat dikatakan bahwa *income* per kapita dari masyarakat yang rendah merupakan wujud dari kurang sejahteranya masyarakat. Hal itu merupakan awal lahirnya para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

3.4.2 Faktor Politik

Proses perumusan kebijakan, pelaksanaan, hingga evaluasi semuanya merupakan proses politik yang dilakukan pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakatnya. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan sebuah bentuk kebijaksanaan melalui Peraturan Daerah Kota Semarang. Hal yang mengatur mengenai Anak Jalanan telah diatur Pemerintah Kota Semarang di dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang. Bagaimana pengimplementasian kebijaksanaan Peraturan Daerah yang ada dan bagaimana

keterkaitan antar berbagai elemen, dijelaskan oleh informan 1, Pak Anggie, sebagai berikut:

“Kita selalu berkoordinasi dengan Satpol PP sebagai penegak perda untuk selalu turun ke jalan, dan dari Pihak Dinas Sosial mendorong untuk Satpol PP menegakkan Perda tersebut berikut sanksi-sanksinya.

Pihak terlibat: Dindik, Polrestabes, Kodim, Satpol PP, TPD, RPSA dan Yayasan Masyarakat. Sesuai dengan tupoksinya, sebagai berikut:

- a. Polrestabes: mengganggu ketertiban umum untuk mengaur*
- b. Kodim : pembinaan terhadap anak jalanan*
- c. Satpol : penegak perda*
- d. TPD : mapping dan turun ke jalan termasuk assesment*
- e. RPSA dan Yayasan LSM : sebagai pendamping dan pembimbing.”*

(Wawancara 28 November 2017)

Mengenai bagaimana memaksimalkan kegiatan dalam rangka Manajemen Strategi Penanganan Anak Jalanan di Kota Semarang, dilakukan berbagai koordinasi dengan aparat penegak Peraturan Daerah Kota Semarang, yakni Satpol PP. Namun tidak hanya Satpol PP, tapi juga dibantu oleh pihak lain, seperti Dinas Pendidikan, Polrestabes, Kodim, TPD, RPSA, dan LSM. Kemudian informan 2, Mba Tiwi, juga menanggapi permasalahan mengenai penerapan Perda dan pihak yang terlibat dengan mengatakan:

“Semua elemen ya harus bersinergi untuk menjalankan Perda Kota Semarang ini, ya dengan semua lembaga terkait seperti Polrestabes, Satpol PP, Kodim, Yayasan Setara dan Dinas Pendidikan, serta berbagai elemen masyarakat.”

(Wawancara 21 Desember 2017)

Sinergitas semua elemen harus sesuai dengan fungsi masing-masing. Informan 3, Mba Ika, dalam hal ini telah menjabarkan bagaimana penerapan Peraturan Daerah ini dengan menyatakan:

“Ya, kami kan hanya bagian dari masyarakat yang turut membantu, tapi, semua penegakkan kebijakan Peraturan Daerah kan dilaksanakan oleh pemerintah dengan dibantu oleh Satpol PP. Kami hanya melakukan advokasi, mendorong pemerintah untuk inisiasi dalam rangka penanganan anak jalanan. Jadi, apabila Semarang ingin bebas anak jalanan, ya ketika ingin bebas anak jalanan, anak-anaknya ini mau diapakan ketika mereka tidak di jalan? Oke, persoalannya kan banyak, misalnya, seperti persoalan ekonomi, kemudian ada nggak bantuan ekonomi yang pemerintah berikan? Contohnya, pemerintah mencanangkan program Semarang bebas anak jalanan, lalu kami mendorong agar pemerintah tidak hanya menghilangkan mereka di jalan dan melarang mereka untuk turun ke jalan. Tetapi kami harapkan pemerintah agar punya program lain di samping sekedar melarang mereka untuk turun ke jalan. Misalnya untuk orangtuanya, pemberdayaan ekonomi, dll. Ada nggak kegiatan yang bisa dikembangkan pemerintah untuk anak-anak jalanan ini?.”
(Wawancara 8 Januari 2018)

Berdasarkan pendapat dari informan 3, selama ini dari pihak masyarakat hanya dapat membantu untuk mengadvokasi, namun pemerintahlah yang harus membuat program dan inisiasi terkait penegakan Perda ini. Jadi, pemerintah diharapkan memiliki terobosan baru terkait pelaksanaan program Manajemen Strategi Penanganan Anak Jalanan. Pemerintah tidak hanya memberikan bantuan atau memberantas dan menghentikan semua kegiatan anak-anak jalanan yang telah lama hidup di jalanan, melainkan juga harus ada upaya lanjutan dan tidak sekedar melarang. Program perlu dipikirkan implikasi keberlanjutannya agar bisa dimanfaatkan dan dikembangkan oleh

anak-anak jalanan supaya hidup mereka teralihkan dari jalanan dengan kegiatan yang lebih bermanfaat. Informan 4, Mas Surya, menjelaskan:

“Peraturan tentang anak jalanan pernah ada pembekalan dan sosialisasi, supaya anak-anak nggak lagi turun ke jalanan dan kepada masyarakat untuk tidak memberi ke anak jalanan.” (Wawancara 17 Januari 2018)

Pemerintah selalu berupaya dalam rangka sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang. Semua elemen yang mendukung paham, dengan prosedur yang harus dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penanganan anak jalanan. Berbagai pernyataan yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa penegakkan dan pelaksanaan Peraturan Daerah yang dilaksanakan oleh Satpol PP, dengan dibantu oleh berbagai elemen ini seharusnya ada program terobosan lainnya yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan adanya program-program terobosan tersebut pemerintah tidak hanya berupaya untuk membebaskan atau membersihkan anak-anak yang berada di jalanan saja, melainkan juga perlu memberikan pemberdayaan sosial terkait dengan berbagai pengembangan *softskills* untuk kemandirian anak jalanan pada masa yang akan datang.

3.4.3 Faktor Sosial dan Budaya

Faktor sosial budaya berkaitan dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Hal ini berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di dalam elemen masyarakat. Faktor sosial budaya ini juga berperan dalam proses pembentukan

dan lahirnya anak jalanan di Kota Semarang, diantaranya adalah budaya yang lahir dari masyarakat yang mendorong lahirnya anak jalanan. Hal ini disampaikan oleh informan 1, Pak Anggie, sebagai berikut:

“Sosial budaya ini juga sangat penting. Adanya budaya memberi dari masyarakat tidak akan membantu mengurangi jumlah anak jalanan, justru meningkatkan jumlah anak jalanan. Jadi, masyarakat yang belum tau itu masih sering memberi uang kepada anak jalanan.” (Wawancara 28 November 2017)

Berdasarkan informasi dari informan 1, bahwa kebanyakan dari faktor sosial budaya yang menyebabkan lahirnya anak jalanan adalah karena di dalam masyarakat masih ditemukan budaya memberi kepada anak jalanan. Hal ini seperti juga dijelaskan oleh informan 2, Mba Tiwi, sebagai berikut:

“Nah, masalah budaya ini dari masyarakat itu masih suka memberi sama anak-anak jalanan. Alasannya ya karena orang-orang itu kasihan, merasa iba, jadi mereka itu masih suka ngasih uang buat anak-anak jalanan. Padahal kan nggak boleh dilakukan, karena ketika mereka tetap memberi itu anak jalanan akan selalu ada, karena masyarakat tetap mendukung. Sebenarnya kan kita cuma minta jangan memberi dan jangan membeli, itu aja. Coba kalau masyarakat melakukan dua hal itu, nggak akan ada lagi itu anak jalanan.” (Wawancara 21 Desember 2017)

Selain budaya memberi, budaya membeli pun juga masih dilakukan oleh sebagian masyarakat. Memberi dengan langsung memberi uang kepada anak jalanan, sedangkan membeli adalah dengan membeli dagangan anak jalanan. Sepakat dengan informan 1 dan 2, informan 4, Mas Surya, juga memberikan tanggapannya mengenai budaya memberi masyarakat sebagai berikut:

“Nah budaya dari masyarakat juga harus berubah, supaya anak-anak nggak lagi turun ke jalanan dan kepada masyarakat untuk tidak memberi ke anak jalanan. Karena gini, ketika kita ngasih anak jalanan mungkin sebesar seribu perak apakah itu bisa menyelamatkan mereka? Enggak. Jadi pemerintah kota bikin wacana tentang itu. Lebih baik berilah kepada lembaga yang dibentuk pemerintah atau masyarakat. Kalau ada yang ngomong kan saya cuma ngasih apa salahnya, nggak salah sih cuma tempatnya yang nggak tepat.”
(Wawancara 17 Januari 2018)

Berdasarkan pendapat dari tiga informan di atas, bahwa faktor sosial budaya yang mempengaruhi lahirnya anak jalanan adalah karena masih ditemukan kecenderungan memberi dan membeli dari masyarakat kepada anak jalanan. Masih banyak masyarakat yang belum tau tentang Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang sehingga masih memberikan uang kepada anak jalanan, padahal di dalam Perda sudah dijelaskan larangannya dalam pasal 24 ayat 1, sebagai berikut:

“Setiap orang dilarang memberikan uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di jalan-jalan umum dan/atau traffic light.”

Selain bentuk budaya memberi dan membeli dari masyarakat, berdasarkan informasi dari informan 3, Mba Ika, anak jalanan juga lahir karena budaya turun ke jalanan yang telah mendarah daging atau terinternalisasi dari keluarga anak jalanan itu sendiri, Mba Ika menyebutkan bahwa:

“Anak jalanan turun ke jalan karena budaya dari keluarga, tidak mudah untuk kembali menyadarkan karena berkaitan dengan mental. Masalah perubahan mental, kita sangat susah untuk merubah mental mereka di jalan yang sudah mendarah daging, jadi kita tidak bisa datang untuk tiba-tiba melarang mereka

jangan turun ke jalan. Karena ya itu sudah budaya, jadi harus dibenahi dulu mentalnya.” (Wawancara 8 Januari 2018)

Berkaitan dengan ketidaktahuan masyarakat mengenai Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang, Dinas Sosial melaksanakan pendekatan secara sosial budaya kepada masyarakat dalam rangka kegiatan sosialisasi mengenai Perda Nomor 5 Tahun 2014, sebagaimana disampaikan oleh informan 1, Pak Anggie, sebagai berikut:

“Ya, kami lakukan diantaranya melalui kampanye dan sosialisasi untuk orangtua dan anak. Kemudian melalui media cetak seperti memasang spanduk, X banner atau papan-papan pengumuman. Oh iya, nanti rencananya akhir tahun kita ada acara Kampanye MIBAJ, yaitu kampanye tentang MIBAJ (Menuju Indonesia Bebas Anak Jalanan) pada bulan Desember dilakukan oleh Dinas Sosial dan pihak-pihak yang terkait.” (Wawancara 28 November 2017)

Bentuk sosialisasi dalam rangka pengenalan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang dilakukan oleh Dinas Sosial adalah dengan melalui kampanye dan sosialisasi, kemudian sosialisasi ini adalah sebagai wujud pendampingan kepada anak dan orangtua supaya lebih mengetahui bagaimana pengaruh adanya anak-anak yang hidup di jalanan untuk ke depannya. Selain untuk mengenalkan kepada masyarakat juga dilakukan dengan pemasangan spanduk, X banner dan papan-papan pengumuman. Kemudian ada kegiatan yang dilaksanakan, yaitu kampanye MIBAJ (Menuju Indonesia Bebas Anak Jalanan) yang dilaksanakan dengan berbagai pihak-

pihak yang terkonsentrasi pada masalah anak jalanan. Mengenai kampanye bebas anak jalanan tersebut juga disampaikan oleh informan 2, Mba Tiwi, yang menyatakan:

“Oh iya, kita melakukan sosialisasi melalui diskusi perangkat tinggi di kecamatan supaya nanti secara turun menurun disampaikan kepada yang di bawahnya, lalu juga kami menyebarkan spanduk-spanduk di jalanan agar masyarakat tau mengenai aturan tentang anak jalanan kepada supaya tidak ada lagi yang mengabaikan aturan. Nanti kami bulan Desember juga akan mengadakan kampanye MIBAJ (Menuju Indonesia Bebas Anak Jalanan).” (Wawancara 21 Desember 2017)

Selain dengan sosialisasi pendampingan ke anak dan orangtua serta pemasangan berbagai spanduk, X *banner* maupun papan-papan pengumuman, kemudian ada juga diskusi grup (*group discussion*) yang langsung dilakukan oleh TPD (Tim Penjangkauan Dinas Sosial) di kantor-kantor kecamatan di Kota Semarang. Diskusi grup terbuka ini nantinya akan disampaikan kepada *audience* oleh ketua camat dan para ketua desa untuk selanjutnya disampaikan secara menurun ke jabatan di bawahnya seperti ketua RT, RW hingga tokoh masyarakat. Selanjutnya, lembaga masyarakat lain seperti dalam hal ini adalah LSM Yayasan Setara juga ikut serta dan bersinergi dalam kegiatan kampanye ini, informan 3, Mba Ika, sebagai wakilnya mengatakan:

“Kita dan Dinas Sosial banyak diskusi, seperti program Wisata Edukasi kemarin, nanti dari yayasan setara dan LSM lainnya ikut dilibatkan, dan untuk kampanye MIBAJ (Menuju Indonesia Bebas Anak Jalanan) itu juga atas usulan dan inisiasi dari kita.” (Wawancara 8 Januari 2018)

Sosialisasi yang disebutkan di dalam pasal 10 Perda Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 rangka penanganan pencegahan, dilakukan melalui kegiatan yang mengikutsertakan kelompok-kelompok masyarakat tertentu baik dalam bentuk pertunjukan, pertandingan, lomba, orasi, pemasangan rambu-rambu tentang larangan memberi uang di jalanan; untuk mengajak dan mempengaruhi mereka ikut melaksanakan kegiatan penanganan dan pengendalian terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Berikut kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial:

Gambar 3.1
Kegiatan Sosialisasi tentang Anak Jalanan oleh Dinas Sosial



Sumber: Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi tentang Anak Jalanan oleh Dinas Sosial, 2017

Berdasarkan gambar 3.1, dapat diketahui bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Semarang dalam rangka Manajemen Strategi

Penanganan Anak Jalanan adalah dengan pemasangan X banner dan serangkaian kegiatan diskusi grup di kantor-kantor kecamatan di Kota Semarang.

3.4.4 Partisipasi Masyarakat

Konsep partisipasi dalam proses pembangunan memiliki arti yang dalam. Hal ini tercermin dari pendapat atau interpretasi yang diteorikan para ahli maupun pengelola pembangunan mengenai pentingnya partisipasi sebagai salah satu elemen yang menentukan keberhasilan pembangunan (Tangkilisan, 2005: 320). Moelyarto (dalam Tangkilisan, 2005: 320) menyebutkan bahwa partisipasi sebagai komponen strategis pendekatan sosial, dengan asumsi dasarnya bahwa rakyat adalah fokus sentral dan tujuan akhir dari pembangunan. Pentingnya partisipasi masyarakat ini kemudian juga disebutkan oleh informan 1, Pak Anggie, yang menyampaikan bahwa:

“Ya, untuk partisipasi masyarakat penting, wujud partisipasi masyarakat dalam usaha mendukung pemerintah di dalam penanganan anak jalanan ini ya melalui berbagai cara, diantaranya maksudnya kan itu dari medsos (media sosial) melaporkan apabila di jalan ada yang gimana-gimana seperti itu dan laporan dari masyarakat sih hanya sebatas itu, untuk selama ini yang saya tangani ya lewat medsos maupun dari kelurahan atau kecamatan atau dari pihak wilayah sekitarnya, ya wilayah sekitar dari pihak-pihak itu (anak jalanan). Cuman seharusnya bagaimana partisipasi masyarakat yang bener itu ya dia harus berpedoman pada Perda ini, jadi dia harus tau karena Perda ini kan pernah disosialisasikan, ya kalo dengan dia memberi ya berarti dia harus dapat sanksi dan lain-lain. Menurut saya ya mereka harus sadar. Kesadaran mereka yang harus ada.” (Wawancara 28 November 2017)

Selama ini, wujud dari partisipasi masyarakat dilakukan juga melalui berbagai laporan yang ada di media sosial dan langsung dari perangkat desa maupun kecamatan.

Namun diharapkan, wujud partisipasi masyarakat ini juga diikuti dengan kesadaran tinggi dari masyarakat untuk lebih mengenal tentang Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang karena diklaim telah disosialisasikan oleh pihak Dinas Sosial. Meskipun begitu, masyarakat masih banyak yang belum mengerti tentang Peraturan Daerah ini, dibuktikan dengan masih banyak ditemuinya beberapa masyarakat yang masih memberikan sesuatu kepada anak jalanan, berupa makanan, minuman hingga uang. Disampaikan oleh informan 2, Mba Tiwi, bahwa:

“Untuk partisipasi masyarakat ini kita nilai masih kurang ya mba. Kenapa? Seperti yang sudah saya sebutkan tadi masalah aturannya kalau tidak boleh memberi dan membeli kepada anak jalanan. Tapi karena orang-orang itu merasa iba, masih tetep ada yang memberi dan membeli. Padahal, kalau masyarakat nggak melakukan dua hal itu, nggak ada lagi itu anak jalanan.”
(Wawancara 21 Desember 2017)

Menurut pendapat dari informan 2, Mba Tiwi, partisipasi masyarakat yang dilakukan masih kurang mengingat masih ditemukannya orang-orang yang kurang mengetahui tentang Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang. Hal itu dibuktikan dengan masih ditemukan pihak-pihak yang memberi uang kepada anak jalanan karena rasa iba, padahal larangan ini telah diatur dalam Perda. Pendapat kedua informan di atas dapat ditarik simpulan, bahwa Dinas Sosial masih mempunyai banyak Pekerjaan Rumah, utamanya dalam hal mengenalkan partisipasi masyarakat dalam masalah Manajemen Strategi Penanganan Anak Jalanan. Untuk itu, semangat sosialisasi harus lebih

digalakkan lagi. Tidak hanya sebatas menyampaikan pesan tertulis, namun juga harus digambarkan wujud nyatanya mengenai semua hal yang berkaitan dengan penanganan anak jalanan.

Informan selanjutnya kemudian juga memberikan pernyataan bahwa penanganan anak jalanan ini harus ada koordinasi antara elemen pemerintah dan masyarakat. Adanya RPSA dan yayasan masyarakat ini juga lahir sebagai bentuk partisipasi aktif dari masyarakat yang memang peduli tentang masalah anak jalanan dan mendorong pemerintah untuk mampu meminimalisir keberadaan anak-anak jalanan di Kota Semarang. Informan 3, Mba Ika, menjelaskan:

“Ya, seperti yang sudah saya katakan tadi kami kan bagian dari masyarakat jadi kami ada karena lahir dari orang-orang yang memang peduli tentang isu-isu anak. Jadi, wujud partisipasinya ya antara lain dengan adanya Yayasan Setara ini.” (Wawancara 8 Januari 2018)

Wujud partisipasi masyarakat dalam rangka penanganan anak jalanan ini dengan adanya LSM yang peduli akan isu-isu anak, seperti Yayasan Setara ini yang berusaha membantu melalui berbagai pendampingan di *basecamp* Yayasan Setara yang tersebar di beberapa wilayah di Semarang. Selain yayasan masyarakat, pemerintah juga membentuk sebuah rumah singgah untuk menangani masalah anak jalanan dalam wujud RPSA (Rumah Perlindungan Sosial Anak). Salah satunya, yaitu RPSA Yayasan Emas Indonesia yang dibentuk berdasarkan SIOP Gubernur Jateng. Informan 4, Mas Surya, menjelaskan sebagai berikut:

“Banyak sekali peran yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam penanganan anak jalanan ini. Jadi, dari masyarakat tidak ada lagi yang

memberi peluang bagi anak jalanan untuk mendapat tempat untuk terus hidup di jalanan. Contohnya saya juga sebagai masyarakat yang ikut berperan dalam penanganan anak jalanan ini dengan ikut menjadi pengurus di RPSA bentukan pemerintah ini. Dulu sempat diomong sama orangtua katanya ngapain sih nggak ada untungnya ngurus hal-hal begini. Tapi ya karena semua itu datangnya sudah datang dari hati ya dilakuin aja. Waktu itu saya datang ke Pembina meminta untuk jadi pengurus di sini, mereka sangat welcome, masuk jadi volunteer lalu jadi pengurus.” (Wawancara 17 Januari 2018)

Peran aktif masyarakat ini masih dapat ditemukan pada masyarakat yang sudah ada keinginan untuk peduli pada isu-isu sosial, terutamanya yang memang peduli dengan masalah anak jalanan. Selain itu, kesadaran masyarakat mengenai isu ini mulai tumbuh sehingga keinginan masyarakat sedikit banyak mulai tumbuh untuk ikut berpartisipasi dalam rangka penyelenggaraan jaminan sosial, antara lain sebagai pengurus di LSM maupun RPSA sebagai wujud dari upaya penanganan anak jalanan.

3.4.5 Teknologi

Sebagai proses yang memudahkan Manajemen Strategi Penanganan Anak Jalanan dibutuhkan teknologi yang memudahkan manusia dalam penyediaan barang-barang atau alat yang diperlukan guna kelancaran dan kelangsungan sebuah kegiatan dan program kegiatan. Peneliti menanyakan bagaimana dukungan teknologi dalam rangka Manajemen Strategi Penanganan Anak Jalanan, hal itu dijawab oleh informan 1, Pak Anggie, sebagai berikut:

“Untuk teknologi sejauh ini paling banner, media sosial, kalau dari media sosial nanti kan dari media sosial itu masyarakat melaporkan gimana-

gimananya. Nanti setelah itu kan kita bisa tau di mana yang ada anak jalanan.”
(Wawancara 28 November 2017)

Penggunaan teknologi dalam rangka Manajemen Strategi Penanganan Anak Jalanan adalah perihal pengenalan anak jalanan yang diiklankan melalui *X banner* yang tersebar diberbagai titik. Media sosial juga membantu melaporkan apabila ada laporan terkait anak jalanan. Hal ini kemudian juga dibenarkan oleh informan 2, Mba Tiwi, yang menyatakan:

“Teknologi ya kan ada penggunaan sosial media, media massa. Orang sekarang kan sudah lebih pinter ya, terus kerjasama sama pihak stasiun televisi-televisi yang ada di sini, terus kita juga kerjasama dengan media massanya itu koran seperti Tribun, jadi ikut berpartisipasi dalam patroli dan ikut melaporkan, terus yang jelas memang harus kerja sama sama tokoh agama (dari berbagai kalangan agama), itu yang paling mujarab, biar disampaikan sewaktu ada acara keagamaan karena masyarakat percaya.” (Wawancara 21 Desember 2017)

Selain hanya menggunakan teknologi *X banner* dan media sosial, informan 2, Mba Tiwi, juga menyebutkan bahwa ada juga dukungan dari pihak-pihak stasiun televisi di Kota Semarang dan dari media massa elektronik maupun non elektronik, seperti surat kabar dari Tribun Jateng yang membantu memberikan laporan terkait keberadaan anak jalanan. Kemudian informan 3, Mba Ika, juga memberikan pernyataannya mengenai peranan langsung teknologi dalam rangka Manajemen Strategi Penanganan Anak Jalanan di Kota Semarang ini dengan memberikan pernyataan:

“Kalau untuk teknologi mungkin lebih pada media kampanye ya, misalnya, kalau yang jelas kita melakukan pendampingan ke anak-anak kan kita dengan menggunakan media artistik. Jadi pendekatannya lebih ke kesenian, bagaimana misalnya lewat lagu, teater dan permainan-permainan, seperti itu. Nah, memang yang lain yang kita kembangkan lebih kepada media untuk menyampaikan isu, contohnya seperti kemarin, kita membuat isu tentang bagaimana sih supaya anak-anak tidak dieksploitasi, nah itu dengan menggunakan workshop collage. Jadi, kerjasama dengan orang-orang yang memang konsen pada masalah anak jalanan. Kemarin kita juga kerjasama sama Grup Nandang Wuyung, itu semacam kesenian wayang tenda begitu kami tampilkan untuk sosialisasi pada anak, tentang bentuk-bentuk eksploitasi pada anak. Media kampanye yang lebih luas ya seperti video yang diputar di depan gedung Pandanaran selama 2 bulan dan itu videonya dibuat langsung oleh kita, yayasan setara yang bekerja sama dengan Dinas Sosial, menampilkan tentang eksploitasi anak jalanan.” (Wawancara 8 Januari 2017)

Media kampanye yang dilakukan kepada anak-anak jalanan adalah dengan pendekatan psikologi melalui media artistik, melalui berbagai kesenian yang berbentuk lagu, teater dan permainan-permainan yang dikembangkan oleh Yayasan Setara serta pertunjukan wayang untuk menyampaikan isu dan hak-hak anak. Intinya pengenalan kepada anak mengenai berbagai bentuk eksploitasi anak, harapannya supaya ke depan anak-anak tidak ada lagi yang menjadi korban eksploitasi. Penulis menyimpulkan bahwa sejauh ini teknologi yang digunakan adalah dengan memaksimalkan teknologi dari media massa, kampanye elektronik, tv swasta, surat kabar, video maupun iklan.